

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan merupakan sebuah unsur yang memungkinkan masyarakat bertahan dan mengembangkan diri mencapai kemajuan (Kartasmita, 1995). Untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. menekankan pada aspek kemandirian dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri. pemberdayaan merupakan upaya mentransformasikan kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat mau dan mampu mengambil bagian secara aktif untuk mendorong terjadinya perubahan (Mochamad et al., 2011). pemberdayaan sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas dalam mencapai kesejahteraan melalui peningkatan keterampilan, partisipasi aktif, dan akses terhadap sumber daya. pemberdayaan mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis.

Di era globalisasi saat ini, dunia bisnis modern mengalami berbagai perubahan dan kemajuan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara berpikir masyarakat yang semakin berkembang, pesatnya kemajuan teknologi, serta gaya hidup yang banyak dipengaruhi oleh arus globalisasi. Kondisi ini mendorong individu untuk beradaptasi agar dapat mengikuti dinamika zaman, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam dunia usaha. Salah satu dampak nyata dari perkembangan ini adalah meningkatnya jumlah produk barang dan jasa yang

ditawarkan di pasar. Setiap produk dan jasa hadir dengan keunggulan dan keunikan masing-masing, memberikan konsumen banyak pilihan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Situasi ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di antara pelaku usaha, sehingga inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam menarik perhatian konsumen.

Kewirausahaan menjadi elemen penting. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru melalui pendekatan kreatif dan inovatif (syarief, 2020), yang tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain tetapi juga menambah nilai ekonomi. Melalui kewirausahaan, individu berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik melalui usaha perorangan maupun usaha bersama di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, dan kerajinan tangan.

Meskipun banyak masyarakat yang berinisiatif membuka usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnisnya. Kendala seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan strategi pengelolaan usaha sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, peran lembaga pendukung yang menyediakan edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi sangat penting. Dengan adanya bantuan dari lembaga-lembaga terkait, pelaku usaha dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis mereka. Hal ini, pada akhirnya, diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (juta)	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)	2.24%	2.28%	0,70%	1,52%

Sumber <https://kadin.iddatadanstatistikumkmindonesia>

Indonesia tercatat pada tahun 2023 peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (KADIN Indonesia, 2023).

UMKM di Indonesia sendiri tak luput dari berbagai permasalahan. Pelaku UMKM di Indonesia dihadapi dengan masalah seperti legalitas, modal, branding dan juga perluasan pasar. Melihat akan adanya permasalahan ini pemerintah mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT- KUMKM) adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM. PLUT KUMKM diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi pusat layanan yang menyediakan berbagai fasilitas bagi UMKM.

Dasar hukumnya mencakup berbagai peraturan yang mengatur pemberdayaan UMKM di Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar utama yang

menekankan pemberdayaan UMKM melalui fasilitas layanan, pelatihan dan pengembangan. dilengkapi oleh PP No. 17 Tahun 2013 sebagai pedoman teknis atas amanat dalam UU No.20 Tahun 2008. Program PLUT mulai dijalankan berdasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 9 Tahun 2023, merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya. menjelaskan tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan layanan terpadu, termasuk pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan akses pasar, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Selain itu, PLUT juga memfokuskan pada digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk membantu UMKM berkembang di pasar modern.

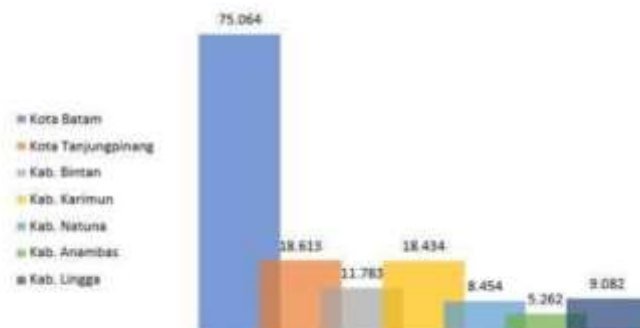
Berdasarkan peraturan tersebut, PLUT termasuk tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan kewenangan secara utuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola PLUT. Pemerintah daerah diminta untuk menyediakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan PLUT ini. PLUT mandiri merupakan sebuah pusat pelayanan UMKM yang didirikan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Kementerian Koperasi dan UKM hanya akan membantu dalam memberikan biaya operasional kepada para konsultan pendamping yang membantu pelaksanaan program PLUT di daerah tersebut.

Pendirian PLUT di suatu daerah melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Prosesnya dapat dilakukan berdasarkan inisiatif pemerintah daerah secara mandiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di Provinsi Kepulauan Riau, saat ini terdapat dua unit PLUT yang beroperasi, yakni di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Penempatan PLUT dilakukan di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi besar serta pertumbuhan UMKM yang signifikan.

Batam merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia, termasuk kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*). Kota Batam adalah pulau dengan berjuta peluang dari berbagai sektor. Tak hanya dari sektor industrinya saja. Posisi strategis Kota Batam yang berbatasan diantara Malaysia dan juga Singapura menjadi alasan Kota Batam memiliki sejumlah peluang dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi. selain dari sektor industri yang saat ini menjadi andalan. usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seharusnya juga ikut didorong untuk lebih berperan dalam perekonomian Kota Batam.

Gambar 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.



sumber: kepriantarnews.com

Berdasarkan data terakhir yang tercatat hingga pertengahan tahun 2022, jumlah pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 146.638 unit. Kota Batam: 51% dari total UMKM di Kepri (sekitar 75.064 unit). Batam menjadi pusat UMKM terbesar karena jumlah penduduk, akses pasar yang strategis, dan infrastruktur yang mendukung. Kabupaten Karimun 13% (sekitar 18.613 unit). UMKM di Karimun berkembang di sektor perikanan, perdagangan, dan jasa. Kota Tanjungpinang 13% (sekitar 18.613 unit). Sebagai ibu kota provinsi lebih berfokus kepada pemerntahan, UMKM di Tanjungpinang dominan di sektor perdagangan dan jasa. Kabupaten Bintan 8% (sekitar 11.783 unit). Fokus pada sektor pariwisata, kerajinan tangan, dan makanan olahan. Kabupaten Natuna: 6% (sekitar 8.448 unit). UMKM di Natuna banyak bergerak di bidang perikanan dan agribisnis. Kabupaten Lingga 6% (sekitar 9.082 unit). Sektor perikanan dan hasil bumi menjadi andalan di Lingga. Kabupaten Kepulauan Anambas 4% (sekitar 5.262 unit). UMKM di Anambas didominasi sektor perikanan dan usaha kecil berbasis lokal (Diskomimfo Kepri, 2022) .

UMKM di Kota Batam juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan. Batam sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan UMKM berbasis ekspor. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Batam. Beberapa permasalahan yang umum ditemui antara lain keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan usaha, minimnya akses permodalan, rendahnya kemampuan

digitalisasi, serta kurangnya pemahaman terhadap legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM membentuk lembaga pelayanan terpadu bernama Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM). PLUT hadir sebagai fasilitator pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar mampu naik kelas melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dibangun pada tahun 2018 lalu bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Koperasi KUMKM Kota Batam. Berkantor di kawasan Golden City, Tanjung Buntung-Bengkong. PLUT Kota Batam diresmikan pada tahun 2022 oleh Haji Muhammad Rudi yang merupakan Walikota sekaligus kepala BP Batam. Bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yaitu bapak Teten Masduki.

PLUT KUMKM Kota Batam, beroperasi sebagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Yang merupakan perpanjangan tangan bagi pemerintah kota untuk memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021- 2026. PLUT memiliki tenaga konsultan pendamping yang bertugas memberikan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). untuk mendukung pelayanan pada bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemberdayaan dan pemasaran bagi masyarakat Koperasi dan Usaha

Mikro. Di Kota Batam sendiri terdiri dari 5 orang konsultan non pegawai, 1 orang Kepala PLUT-KUMKM dengan jabatan PNS, 1 orang bagian tatausaha dengan jabatan PNS, dan 1 orang staff dengan jabatan PPK. PLUT KUMKM Kota Batam memiliki tim konsultan yang terdiri dari lima orang, masing-masing dengan spesialisasi di bidang:

- a) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM): Membantu dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha serta pengembangan kapasitas SDM.
- b) Produksi dan Teknologi: Memberikan pendampingan dalam proses produksi, inovasi produk, dan penerapan teknologi tepat guna.
- c) Pemasaran: Membantu dalam strategi pemasaran, branding, dan perluasan akses pasar, termasuk pemanfaatan digital marketing.
- d) Pembiayaan: Memberikan konsultasi terkait manajemen keuangan, akses pembiayaan, dan literasi keuangan.
- e) Kewirausahaan: Mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan dan perencanaan bisnis yang berkelanjutan.

Layanan yang diberikan oleh PLUT Kota Batam cukup beragam dan mencakup berbagai aspek kebutuhan usaha UMKM, antara lain:

- a) Konsultasi Bisnis: Pendampingan dalam perencanaan dan pengembangan usaha.
- b) Pelatihan dan Workshop: Peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan.

- c) Fasilitasi Legalitas Usaha: Bantuan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan sertifikasi halal.
- d) Pendampingan Akses Pembiayaan: Konsultasi untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- e) Pengembangan Produk dan Kemasan: Bantuan dalam inovasi produk dan desain kemasan yang menarik.
- f) Pemasaran Digital: Pendampingan dalam pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk.

Legalitas usaha mencakup semua aspek hukum yang memastikan suatu usaha diakui dan sah menurut hukum (Ardiansyah, 2023). termasuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diurus melalui sistem OSS. Sertifikat halal, izin edar BPOM, atau izin khusus untuk sektor tertentu. PLUT bertugas memberikan pendampingan, bimbingan, dan edukasi kepada UMKM dalam memahami dan memperoleh legalitas usaha, termasuk membantu mereka memahami prosedur perizinan.

Dengan mendapatkan izin usaha, pelaku UMKM dapat menikmati berbagai keuntungan, di antaranya pertama mendapatkan legalitas usaha, kedua mempermudah akses modal, ketiga memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya legalitas untuk kelangsungan usaha mereka.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam tidak semua dari jumlah UMKM di Kota Batam aktif berusaha, masih banyak pertumbuhan UMKM baru yang belum tercatat. dari sekian banyak jumlah usaha mikro yang ada masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Padahal dengan memiliki legalitas usaha yang jelas pelaku usaha UMKM kedepannya bisa mendapat pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan pemasaran agar lebih berkembang.

Masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat yang belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Hal ini umumnya disebabkan oleh anggapan bahwa proses pengurusan legalitas bersifat rumit dan membutuhkan biaya besar. Padahal, faktanya, seluruh proses tersebut dapat diakses secara gratis. Misalnya, pengurusan NIB tidak dipungut biaya, dan sertifikat halal pun tersedia melalui program khusus dari Kementerian Agama secara cuma-cuma. Menyikapi kondisi ini, pihak PLUT KUMKM Kota Batam secara aktif melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi untuk berkembang secara berkelanjutan di dunia usaha. (Aziz, 2024).

Selain itu juga pengurusan pendaftaran Merek Dagang dan Merek Jasa yang terlalu berbelit. Padahal Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam dibantu dengan PLUT KUMKM sebagai teknis pelaksana selalu mengadakan kegiatan pendaftaran Merek Dagang dan Merek Jasa gratis selama pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

PLUT KUMKM sebagai pelaksana teknis berupaya membantu UMKM agar mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batam dalam membuat legalitas usaha. Dimana legalitas suatu usaha menjadikan salah satu syarat dilakukannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memiliki legalitas usaha yang jelas pelaku usaha dapat memperoleh akses bantuan tentunya dengan lebih mudah. Kota Batam sebagai kota industri yang jumlah pelaku usaha UMKM nya terbesar di Kepulauan Riau seharusnya sudah memiliki pembinaan legalitas usaha yang jelas. PLUT KUMKM Kota Batam bertujuan untuk menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kota Batam, tempat mereka dapat memperoleh solusi atas berbagai permasalahan usaha. Dengan layanan yang komprehensif dan dukungan dari tim konsultan yang berpengalaman, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mereka. Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti pengembangan usaha yang ada melalui **Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Batam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Implementasi Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Batam.**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu kepada pelaku usaha UMKM di Kota Batam. Serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengetahuan pada bidang studi Ilmu Pemerintahan. Khususnya pengetahuan terhadap pengembangan usaha terhadap para pelaku usaha, yang telah dilakukan oleh PLUT-KUMKM Kota Batam. Selain itu, penelitian juga diharapkan menjadi acuan dalam menambah wawasan peneliti ke depannya dan media perbandingan bagi peneliti-peneliti yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan menambah pengetahuan peneliti dalam pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM Kota Batam. Selain itu, peneliti juga mendapatkan pengalaman dalam menulis dan meneliti penelitian ilmiah.

2. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya dan bisa menjadi pelaku usaha yang maju serta mandiri untuk kedepannya. Serta masyarakat dapat menjalankan edukasi serta pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui PLUT-KUMKM Kota Batam.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan masukan pemerintah, serta dapat melihat sejauh mana implementasi program pengembangan usaha yang telah dilakukan.

